

JURNAL RUDI FIRMANSAH

**ANALISA *PRO POOR GROWTH* DKI JAKARTA
TAHUN 2005-2011**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Rudi Firmansah
105020115111006**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISA *PRO POOR GROWTH* DKI JAKARTA TAHUN 2005-2011

Yang disusun oleh :

Nama : Rudi Firmansah
NIM : 105020115111006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juli 2013

Malang, 15 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

David Kaluge, SE,MS.,M.Ec-Dev.,Ph.D

NIP. 196012251987011001

ANALIS PENGARUH POLA PERTUMBUHAN PADA KEMISKINAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Rudi Firmansah

David Kaluge

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: rudi.firmansah@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini meneliti tentang pro poor growth DKI Jakarta dan pengaruh sektor-sektor ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2011. Alat yang digunakan untuk mengkategorikan pro poor growth adalah Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) dan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor terhadap kemiskinan digunakan analisis data panel. Dari hasil kedua analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan pertumbuhan di DKI Jakarta lebih didominasi oleh pertumbuhan yang tidak pro poor. Dan sektor konstruksi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sedangkan sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Kata kunci: Pro poor growth, data panel kemiskinan, jumlah penduduk, sektor-sektor ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan bernegara, bahkan telah dicatat dalam undang-undang dasar negara Indonesia. Peran serta negara dalam mengatasi kemiskinan termaktub dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Strategi pengentasan kemiskinan dengan mengandalkan “*trickle down effect*” yang mengandalkan pertumbuhan nampaknya tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dimana rata-rata pertumbuhan dari tahun 2004 hingga 2011 berkisar diangka 6% namun pengurangan kemiskinan hanya berkisar 2%. *Trickle down effect* ini bisa diidentikan kepada strategi yang berfokus pada pertumbuhan sektor-sektor tertentu, pihak-pihak tertentu, daerah-daerah tertentu yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan memberikan efek kepada pihak-pihak lain, sektor-sektor lain atau daerah-daerah lain sehingga pertumbuhan akan tumbuh dan merata dengan sendirinya. Kakwani dan Pernia (2000) menerangkan tentang *trickle down effect* sebagai tetesan manfaat dari orang yang pertama menikmatinya yaitu orang kaya kemudian sisa dari keuntungan tersebut jatuh lagi kepada masyarakat miskin sehingga manfaat bagi masyarakat miskin lebih kecil ketimbang manfaat yang diterima orang pertama Pada tahun 2004-2009 Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menetapkan strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth, pro jobs dan pro poor* melalui strategi ini, diharapkan terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Strategi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan *growth with equality* adalah dengan keberpihakan ekonomi pada masyarakat lemah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Dalam penjelasan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010, pemerintah menyatakan keberhasilan dalam pencapaian strategi *pro growth* dan *pro job* dengan indikator yang jelas yaitu pendapatan perkapita yang meningkat dan angka pengangguran yang turun. Keberhasilan pencapaian *pro growth* ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4.5%. Memasuki periode 2005-2008, perekonomian tumbuh menjadi rata-rata 6 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyaknya negara yang pertumbuhannya negatif. Pada strategi pertumbuhan *pro job*, pemerintah Indonesia telah mencapai indikator keberhasilan, hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka yang turun cukup signifikan yakni dari angka 11,24% pada tahun 2004 menjadi 7,87% ditahun 2009. Hal berbeda ditunjukkan dengan strategi pertumbuhan *pro poor*. Pemerintah tidak menyatakan secara jelas tentang indikator keberhasilan strategi yang pro pada

kemiskinan. belum adanya konsesus tentang definisi *pro poor growth* membuat strategi tersebut hanya sebagai pernyataan yang normatif.

Pro poor growth tidak hanya dinilai dari pengurangan jumlah angka kemiskinan tetapi juga pertumbuhan yang memihak pada masyarakat miskin sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam pada pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi selama ini. Keberpihakan ekonomi kepada masyarakat lemah seperti yang tercantum pada strategi pembangunan seharusnya berimplikasi kepada pertumbuhan pendapatan masyarakat ekonomi lemah (miskin).

tulisan ini akan dianalisis adalah mengenai *pro poor growth* di DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia adalah cerminan kebijakan pelaksanaan pola pertumbuhan di Indonesia. Perencanaan pembangunan DKI Jakarta harus disesuaikan dengan perencanaan yang pemerintah pusat yaitu memprioritas pembangunan untuk rakyat miskin. Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang selalu positif sejak tahun 1998 dan angka kemiskinan yang hanya berkisar 4% bukan jaminan bahwa *pro poor growth* telah terjadi di DKI Jakarta. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan serta didukung oleh infrastruktur yang memadai sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi apakah mengalami pertumbuhan yang pro kepada masyarakat lemah (miskin) atau tidak?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Nafziger (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi suatu negara atau pendapatan per kapita. Produksi tersebut dihitung dengan GNP (Gross National Product – Produk Nasional Bruto) atau GNI (Gross National Income – Pendapatan Nasional Bruto) yang merupakan total output dari negara tersebut.

Terdapat dua teori yang mendasari sumber pertumbuhan dilihat dari ketimpangan dan pemerataan. Teori tersebut adalah

a. *Growth with inequality*

Dalam buku *Ekonomika Otonomi Daerah* karangan Badrudin (2012) teori pertumbuhan Nicholas Kaldor menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitu buruh dan pengusaha, pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan pengusaha dan pendapatan buruh

$$K + B = Q \quad (1)$$

Dimana K = Pendapatan kelompok kapitalis yang disebut dengan keuntungan

B = Pendapatan kelompok buruh yang disebut dengan upah

Pertumbuhan meningkat bila rasio K/Q mendekati angka satu dan sebaliknya pertumbuhan akan menurun bila rasio K/Q mendekati angka nol. Teori ini hasil penelitian pada dua belas negara industri dan menghasilkan kesimpulan bahwa terjadi korelasi yang tinggi antara pertumbuhan *output* manufaktur dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya *return of scala* dalam aktivitas industri. Selain itu penelitiannya juga menghasilkan bahwa adanya korelasi yang tinggi antara peningkatan *output* sektor manufaktur dengan pertumbuhan *output* lain terutama sektor pertanian sehingga produktivitas dan standar kehidupan sektor pertanian juga meningkat.

Pada teori Kaldor diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat harus mengkorbankan (*trade off*) pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan yang cepat menurut Kaldor terjadi pada saat *share* yang diterima oleh pemilik modal lebih besar dari *share* yang diterima oleh pemilik tenaga kerja agar terjadi peningkatan tabungan untuk investasi. Sama seperti teori pertumbuhan Harrod-Domar, ketimpangan akan menciptakan kemampuan menabung yang besar oleh golongan kaya sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi.

b. *Growth with distribution*

Bridsall (dalam Mulatsih dan Pambudy, tanpa tahun) meneliti tentang pertumbuhan di Asia dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan. Pertumbuhan-pertumbuhan di Asia bersumber dari peningkatan produktivitas pedesaan karena adanya pembangunan infrastruktur pedesaan dan kemudahan akses pendidikan bagi semua golongan. Berbeda dengan teori Kaldor dan Harrod-Domar, *growth with distribution* lebih menekankan kepada peningkatan produktivitas dan investasi luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional. Ketimpangan akan

menyebabkan akses pendidikan sulit dijangkau oleh masyarakat dan investor enggan masuk karena tidak tersedianya tenaga terdidik di negara tersebut sehingga pertumbuhan justru melambat. Pemerataan akan meningkatkan investasi di sektor pendidikan meningkat sehingga menurut teori Sumber Daya Manusia akan meningkatkan produktivitas ekonomi negara tersebut.

Kemiskinan

Banyak konsep yang menjelaskan tentang ukuran dari kemiskinan. Khusus di Indonesia ada beberapa konsep untuk pengukuran yang biasa digunakan pemerintah. antara lain adalah ukuran yang dipublikasikan oleh BPS dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran kebutuhan dasar bukan makanan yang paling esensial (*basic need approach*). Peubah-peubah pengukurannya dijadikan ke dalam nilai rupiah sesuai dengan harga yang berlaku di daerah tersebut (BPS,2012).

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kecuali untuk DKI Jakarta yang seluruh wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Ketimpangan

Ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan ukuran indeks koefisien Gini dan ukuran Bank Dunia. Koefisien Gini yang juga digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur ketimpangan memenuhi empat kriteria prinsip sebagai ukuran yang baik. Prinsip pertama adalah anonimitas, independensi skala, independensi populasi dan transfer). Prinsip Anonimitas mengatakan bahwa ukuran ketimpangan seharusnya tidak tergantung pada siapa yang mendapat pendapatan yang lebih tinggi; dengan kata lain, ukuran tersebut tidak tergantung pada apa yang kita anggap sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin. Prinsip independensi skala menyatakan bahwa ukuran tidak terpengaruh dengan ukuran suatu perekonomian hasilnya dapat dibandingkan di negara mana saja. Prinsip skala populasi mirip dengan independensi skala nama objeknya adalah tidak tergantung dengan ukuran populasi. Terakhir adalah prinsip transfer (Pigou-Dalton), yaitu ketimpangan akan berubah apabila terdapat transfer dan keadaan yang lain (Gary Field dalam Todaro dan Smith,2006). Selain empat prinsip tersebut koefisien Gini memenuhi mean independence artinya tidak tergantung pada nilai rata-rata. Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.

Konsep Pro Poor Growth

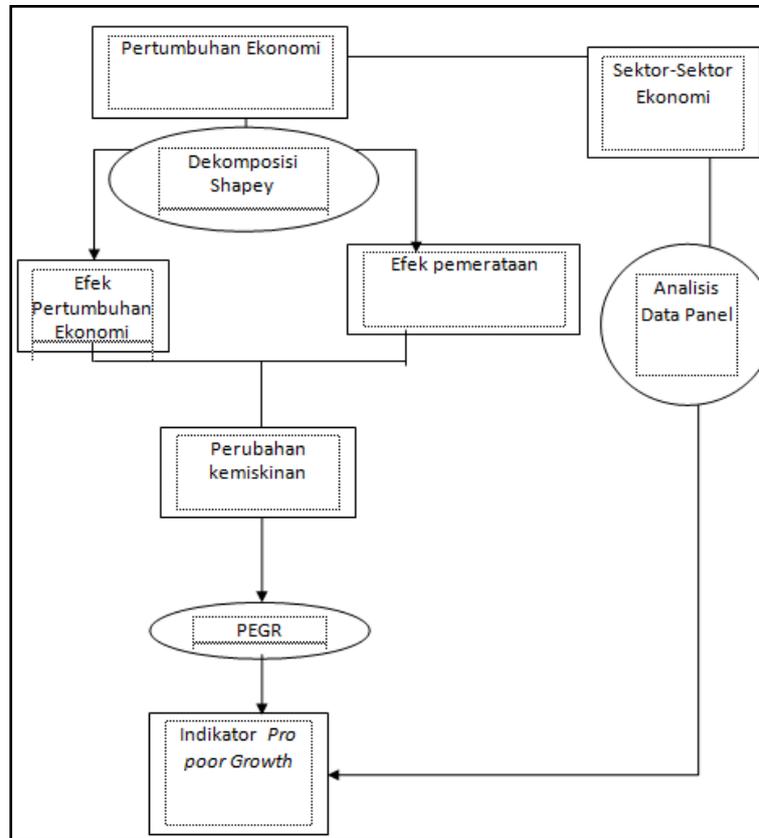
. Definisi yang lebih khusus diberikan oleh Kakwani dan kawan-kawan (2003) yang menekankan manfaat yang lebih besar dari pertumbuhan harus dinikmati oleh orang miskin ketimbang orang tidak miskin. Definisi yang diutarakan White dan Anderson (2000) tentang pro poor growth adalah ketika kenaikan pendapatan bagian miskin melebihi bagian (share) saat ini atau melebihi bagian rata-rata populasi. Secara tidak langsung ini berarti pertumbuhan memperbaiki ketimpangan pendapatan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. yang bertujuan untuk mencari elastisitas kemiskinan baik karena adanya pertumbuhan ekonomi maupun juga karena ada perubahan distribusi pendapatan. Dari pengolahan data ini kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil dari analisis tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder data mentah SUSENAS untuk mencari perubahan dalam kemiskinan karena faktor pertumbuhan dan karena perubahan dalam distribusi pendapatan. Namun studi ini tidak mencari interaksi antara pertumbuhan dan ketimpangan. Untuk interaksi antara pertumbuhan dan Ketimpangan dapat dilihat dalam penelitian lain yang khusus mencari hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan, dan sebaliknya.

Gambar 1: Kerangka pemikiran



Sumber : Diolah.

Dari gambar 1 diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah fungsi inderitas dari pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Sehingga pertumbuhan dikatakan *pro poor growth* ketika ada perubahan distribusi pendapatan kearah yang lebih baik.

D. HASIL PEMBAHASAN

Hasil dari analisis PEGR Menggunakan aplikasi STATA DASP dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1: Hasil PEGR DKI Jakarta

Tahun	Pertumbuhan Aktual	PEGR	Net Effect	
2005-2006	0.028589	-0.143602	-0.172191	Anti PPG
2006-2007	3909.724752	3909.724747	-0.000005	Anti PPG
2007-2008	-0.999477	-0.498493	0.500984	PPG
2008-2009	-0.051366	0.002631	0.053997	PPG
2009-2010	0.186090	0.172602	-0.013488	Anti PPG
2010-2011	0.129878	0.060469	-0.069409	Anti PPG

Sumber: Hasil Stata DASP (diolah)

Dari tabel diatas pertumbuhan dikategorikan anti *pro poor* ketika nilai *net effect* bernilai negatif. *Net effect* didapat PEGR dikurangi pertumbuhan aktual. Ketika γ^* (PEGR) lebih besar dari γ

(pertumbuhan aktual) maka pertumbuhan dikategorikan *pro-poor* sebaliknya, ketika γ^* kurang γ maka pertumbuhan tidak dikategorikan *pro poor*. Jika $0 < \gamma^* < \gamma$ ketimpangan meningkat selama pertumbuhan tetapi kemiskinan tetap menurun.. Ketika $\gamma < \gamma^* < 0$ perekonomian sedang mengalami resesi namun tetap dikategorikan *pro poor* karena dampak resesi lebih merugikan rumah tangga non miskin ketimbang rumah tangga miskin. Dan jika $\gamma^* < \gamma < 0$ maka dikategorikan resesi lebih besar dirasakan dampaknya oleh rumah tangga miskin.

Untuk lebih memperjelas gambaran mengenai *pro poor growth* dapat digunakan metode dekomposisi kemiskinan Shapley sehingga dapat dilihat sumber asal pengurangan kemiskinan. hasil dari dekomposisi kemiskin dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Dekomposisi Kemiskinan Shapley

Tahun	Efek Pertumbuhan	Efek Distribusi	Total Efek
2005-2006	-0.075430	0.222607	0.147177
2006-2007	-0.046024	0.014429	-0.0316
2007-2008	0.004145	-0.000307	0.003838
2008-2009	0.004862	-0.005216	-0.00035
2009-2010	-0.002746	-0.002532	-0.00528
2010-2011	-0.004257	0.003458	-0.0008

Sumber: Hasil Stata DASP (diolah)

Tanda negatif menandakan sifat hubungan yaitu peningkatan pada variabel tersebut akan mengurangi kemiskinan dalam bentuk persentase. Misalnya periode 2005-2006, efek pertumbuhan bernilai -0.075430, artinya pertumbuhan mengakibatkan pengurangan kemiskinan sebesar 7.5% namun disisi lain disitribusi pendapatan tidak menunjukkan hal yang baik (ketimpangan meningkat). Sehingga pertumbuhan disertai ketimpangan yang melebar dan justru menambah kemiskinan pada efek total.

Begitu juga yang terjadi pada tahun 2006-2007. Pertumbuhan mengurangi kemiskinan namun tidak disertai dengan pemerataan. Akan tetapi efek pertumbuhan lebih besar ketimbang efek distribusi sehingga secara total pada periode tersebut terjadi pengurangan kemiskinan sebesar 3%.

Periode 2007 dan 2008 yang dikategorikan oleh PEGR ternyata disebabkan oleh pemerataan yang menunjukkan perbaikan. Walaupun disisi lain pertumbuhan bertanda positif. Begitu juga dengan tahun 2008-2009 yang dikategorikan *pro poor*. Pemerataan pada tahun ini menunjukkan perbaikan sehingga mengurangi kemiskinan.

Periode 2009-2010 menunjukan efek distribusi yang negatif namun tidak dikategorikan *pro poor*. Hal ini disebabkan karena efek distribusi pendapatan kurang lebih kecil bila dibandingkan dengan efek pertumbuhan. Sehingga manfaat pertumbuhan lebih dirasakan oleh pihak yang tidak miskin ketimbang orang miskin.

Tujuan akhir dari *pro poor growth* adalah untuk mengurangi kemiskinan. oleh sebab itu harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga pengambil kebijakan dapat mengantisipasi permasalahan yang akan datang. Pada model penelitian ini variabel independen adalah sektor-sektor ekonomi dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk disertakan karena Jakarta sebagai ibu kota menjadi magnet urbanisasi.

$$\log P_{it} = \alpha + \beta_i \log S_{jit} + C \log N_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

dimana

$\log P_{it}$ = logaritma jumlah kemiskinan i pada periode ke- t (satuan jiwa)

α = *intercept*

S_{jit} = porsi PDRB sektor j periode t pada daerah I (satuan rupiah) yang didapat dari pangsa sektor j dikali dengan PDRB perkapita

N_{it} = jumlah penduduk

Dari hasil analisis data panel menggunakan *eviews* model *fixed effect* dapat dilihat pada gambar 2. Dari 10 variabel hanya dua yang signifikan yaitu sektor konstruksi yang berkoefisien negatif terhadap kemiskinan serta sektor Jasa Keuangan, real estate & Jasa Perusahaan yang berkoefisien positif terhadap kemiskinan. Karena model yang digunakan adalah model *double log* maka hasil regresi tersebut dimaknai dengan elastisitas. Koefisien konstruksi sebesar 4% berarti peningkatan sektor konstruksi sebesar 1% akan mengurangi kemiskinan sebesar 4%, sedangkan peningkatan sektor keuangan akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 3,6%. Peningkatan ini bisa melalui ketimpangan yang meningkat maupun penurunan pendapatan.

Tabel 3: Koefisien Hasil Regresi Data Panel Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.451905	6.084959	0.402945	0.6903
X1?	-1.185032	0.838275	-1.413655	0.1693
X2?	3.303830	3.059781	1.079760	0.2902
X3?	0.343869	1.332163	0.258128	0.7983
X4?	-0.038644	0.123903	-0.311885	0.7576
X5?	-4.031673	2.050450	-1.966238	0.0600
X6?	0.677605	0.655273	1.034079	0.3106
X7?	0.415346	0.789883	0.525832	0.6035
X8?	3.641071	1.997222	1.823068	0.0798
X9?	0.318639	1.188857	0.268021	0.7908
X10?	-0.855463	0.939768	-0.910292	0.3710

Sumber: Hasil Estimasi *Eviews* (diolah)

Hasil Uji F Statistik

Nilai probabilitas untuk F Statistik adalah nol ini berarti secara bersama-sama perubahan pada sektor-sektor PDRB dan jumlah penduduk akan berpengaruh pada perubahan variabel dependen yaitu kemiskinan (lihat tabel 4).

Tabel 4: Nilai R^2 dan *F* Statistic

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.979755	Mean dependent var	4.648854
Adjusted R-squared	0.968074	S.D. dependent var	0.559491
S.E. of regression	0.099968	Akaike info criterion	-1.485593
Sum squared resid	0.259836	Schwarz criterion	-0.823623
Log likelihood	47.19745	Hannan-Quinn criter.	-1.242955
F-statistic	83.88242	Durbin-Watson stat	1.546313
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Estimasi *Eviews* (diolah)

Hasil R^2 (Squared)

Nilai *R-squared* (R^2) atau koefisien determinasi model *Fixed Effect* sebesar 0.97 yang menunjukkan bahwa 97% keragaman perubahan kemiskinan di DKI Jakarta dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model (lihat tabel 4).

Pembahasan Hasil Penelitian

Penyebab Tingginya angka kemiskinan disaat tingginya angka pertumbuhan di DKI Jakarta dapat terjawab sebagian dengan hasil dari hasil regresi data panel yang menunjukkan koefisien positif dan signifikan pada sektor yang berkontribusi paling besar yaitu sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan seperti dapat dilihat pada tabel 3. Sektor konstruksi berkoefisien negatif

dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 4,03. ini berarti peningkatan sektor konstruksi 1% dapat mengurangi angka kemiskinan sebesar 4,03%. sebaliknya dengan sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan memiliki koefisien yang positif dan signifikan. Pertumbuhan sektor ini sebesar 1% meningkatkan angka kemiskinan sebesar 3,6%. sedangkan untuk sektor lain seperti sektor pertanian, sektor listrik air dan gas dan jumlah penduduk berkoefisien negatif namun tidak signifikan. Sektor perdagangan, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi berkoefisien positif namun tidak signifikan

Menurut Ravallion dan Datt besarnya pengaruh pertumbuhan sektor tertentu pada kemiskinan tergantung pada *share population* yang terlibat pada sektor tersebut dalam hal ini adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tersebut. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang terlibat terutama untuk tenaga kerja yang tidak terampil maka semakin besar pengaruhnya terhadap kemiskinan. tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan jumlah penggunaan tenaga kerja

Tabel 5: Jumlah penggunaan tenaga kerja di DKI tiap sektor

Sektor	Jumlah tenaga kerja 2011	Jumlah tenaga kerja 2012
Pertanian	28.477	30.404
Pertambangan	19.184	15.284
Industri Pengolahan	754.984	690.816
Listrik, Gas & Air Bersih	17.473	15.894
Konstruksi	191.493	163.033
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.733.631	1.642.120
Transportasi dan Komunikasi	425.631	393.284
Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan	312.413	440.285
Jasa-Jasa	1.206.474	1.196.756
Jumlah	4.689.760	4.587.876

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pada tabel 5 di atas, sektor perbankan dan jasa keuangan yang pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 27% terhadap PDRB menyerap hanya 440.285 tenaga kerja atau 9.6%. hal ini menjadi indikasi langsung bahwa ketimpangan yang tinggi terjadi pada perekonomian DKI Jakarta karena 9.6% populasi berkontribusi 27% terhadap PDRB. Koefisien positif pada sektor keuangan juga menjadi bukti tidak berjalannya fungsi perbankan sebagai intermediasi pembangunan terutama dalam hal pengurangan kemiskinan. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan salah satu masalah perekonomian di Indonesia adalah, pertama, rendahnya akses masyarakat kepada institusi keuangan sehingga produktivitas juga rendah. Kedua adalah rendahnya penetrasi perbankan kepada masyarakat khususnya kepada sektor usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha kecil yang tidak bankable atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan modal dari sektor perbankan menjadikan sektor keuangan tidak pro poor. Di DKI Jakarta pada tahun 2011 jumlah individu yang bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain adalah sebesar 798.085 jiwa (Jakarta Dalam Angka 2012).

Faktor lain penyebab positifnya koefisien sektor keuangan dikarenakan Jakarta sebagai pusat keuangan dimana kantor-kantor pusat bank baik nasional maupun multi nasional berlokasi di

Jakarta. Nilai tambah yang dihasilkan sektor ini dihitung dengan menggunakan metode pendapatan artinya Keuntungan yang dihasilkan lembaga keuangan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Sektor keuangan sebagai input dalam pertumbuhan ekonomi (modal) mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta namun tidak berdampak positif kepada sektor usaha yang pro terhadap masyarakat miskin. Levine (dalam Zhuang dan kawan-kawan, 2009) meneliti tentang pertumbuhan yang berkesinambungan dan menyimpulkan bahwa negara yang bank dan pasar keuangannya berfungsi baik akan tumbuh dengan cepat, itu mengapa pertumbuhan Jakarta sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Terakhir, Hipotesis Gary Field tentang tingginya pertumbuhan yang disertai ketimpangan yang disebabkan oleh pengayaan sektor modern dialami oleh Provinsi DKI Jakarta. Sektor Jasa Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan adalah industri yang bersifat capital intense. Pengayaan sektor modern akan mengakibatkan pertumbuhan tumbuh dengan cepat dan disertai dengan ketimpangan yang tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan PEGR dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

1. Pertumbuhan *pro poor* hanya terjadi pada dua periode dari enam periode penelitian yaitu pada periode 2007-2008 dan 2008-2009. Dari hasil penelitian ini pada kedua periode tersebut juga terjadi perbaikan distribusi pendapatan dilihat dari hasil dekomposisi Shapley.
2. DKI Jakarta mempunyai pola yang berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Periode efek pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan adalah pada periode tahun 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010 dan 2010-2011. Untuk efek distribusi yang mengurangi kemiskinan terjadi pada periode 2007-2008, 2008-2009 dan 2009-2010.
3. Sektor ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di DKI Jakarta adalah sektor pertambangan dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan koefisien yang positif artinya setiap pertumbuhan pada kedua sektor tersebut akan meningkatkan jumlah angka kemiskinan. Sektor pertanian, listrik air dan gas, konstruksi, jasa-jasa lainnya dan jumlah penduduk berkoefisien negatif dan sektor perdagangan berkoefisien positif namun tidak signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat disusun beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Pertumbuhan di Jakarta dikategorikan *pro poor* bila ada perbaikan distribusi pendapatan dan salah satu tugas pemerintah adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan tidak hanya melalui transfer pendapatan namun juga dapat melalui subsidi pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya yang berhubungan dengan produktifitas ekonomi. Sehingga dapat menciptakan pendapatan untuk kaum miskin.
2. Sektor Keuangan adalah sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB DKI Jakarta dan berkoefisien positif terhadap kemiskinan untuk itu diperlukan usaha lebih besar dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengarahkan sektor keuangan yang *pro poor* misalnya mempermudah pinjama bagi usaha non formal..
3. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode yang lebih panjang dan model yang lebih lengkap agar terhindar dari gejala multiokolineritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada David Kaluge David Kaluge, SE,MS.,M.Ec-Dev.,Ph.D, selaku dosen pembimbing dan Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2005-2012. Jakarta Dalam Angka 2005-2012. <http://jakarta.bps.go.id> Diakses 11 April 2013.
- Badruddin, Rudy.2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Baltagi, Badi H. tanpa tahun. Panel Data Methods. <http://www.zew.de> Diakses 10 April 2013.
- Barro, Robert J. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*. (No.5, pp. 5–32)
- Bourguignon, François. 2004. The Poverty-Growth-Inequality Triangle. Makalah disajikan dalam the Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, 4 Februari 2004.
- Charles-Col, Jorge A. 2010. Understanding Income Inequality: Concept, Causes And Measurement. *International Journal of Economics and Management Sciences*. (Vol. 1, No. 3, pp. 17-28).
- Datt, G. and Ravallion, M. 1992. Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures: A Decomposition with Application to Brazil and India in the 1980s. *Journal of Development Economics*;38: 275-295.
- Forbes, Kristin J. 2000. A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth. <http://web.mit.edu> Diakses 11 April 2013
- Diego, F Grijalva. 2011. Inequality and Economic Growth: Bridging the Short-run and the Long-run. <http://www.escholarship.org> Diakses 11 April 2013.
- Hak, Ahsanul, 2011. Analisis Perubahan Struktur dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Analisis Model Input Output). Tesis. Bogor: IE-IPB.
- Hajiji, Ajid. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan di Propinsi Riau. Tesis. Bogor: IE-IPB.
- Hull, Katy. 2009. Understanding the Relationship between Economic Growth, Employment and Poverty Reduction. *Economic Growth, Employment And Poverty Reduction* hal 69-94.
- Kakwani, Nanak DKK. 2003. Poverty Equivalent Growth Rate: With Applications to Korea and Thailand. <http://www.worldbank.org> Diakses 10 April 2013
- Kakwani, Nanak dan Pernia, Ernesto M. 2000. What is Pro-poor Growth?. *Asian Development Review*. (vol. 18, no. 1, tanpa halaman).